

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan seiring meningkatnya tuntutan terhadap penerapan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*). Akuntansi sektor publik tidak lagi dipahami hanya sebagai proses pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi keuangan mendorong setiap organisasi yang mengelola dana publik, baik instansi pemerintah maupun organisasi nirlaba, untuk menyajikan laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Secara teoritis, akuntansi sektor publik merupakan sistem informasi akuntansi yang dirancang untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan sebagai dasar pertanggungjawaban kepada masyarakat. Menurut Andarsari (2016), ruang lingkup akuntansi sektor publik tidak hanya mencakup organisasi pemerintahan, tetapi juga organisasi nonpemerintah yang tidak berorientasi pada laba, seperti yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, rumah sakit, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi sosial lainnya. Karakteristik utama organisasi sektor publik adalah penggunaan sumber daya yang berasal dari masyarakat sehingga pengelolaannya harus mengedepankan prinsip akuntabilitas publik.

Salah satu entitas yang termasuk dalam ruang lingkup akuntansi sektor publik adalah organisasi berorientasi nirlaba. Organisasi nirlaba didirikan bukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, melainkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, maupun kemanusiaan. Berbeda dengan entitas bisnis memperoleh pendapatan melalui aktivitas komersial, organisasi nirlaba memperoleh sebagian besar sumber dananya dari sumbangan, hibah, donasi, kolekte, maupun bentuk kontribusi lainnya yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat tanpa mengharapkan imbalan ekonomi secara langsung. Oleh karena itu, organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut secara transparan dan akuntabel kepada para penyumbang, anggota organisasi, masyarakat luas (Ningtyas dkk., 2024).

Dalam perspektif teori akuntansi, akuntabilitas merupakan kewajiban suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan aktivitas kepada pihak yang memberikan amanah. Bentuk nyata dari akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pengelola organisasi, tetapi juga sebagai media komunikasi yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, serta perubahan sumber daya organisasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut.

Untuk mewujudkan keseragaman penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba, Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba yang mulai berlaku efektif menggantikan PSAK 45. Kehadiran ISAK 35 bertujuan memberikan pedoman yang lebih sederhana dan selaras dengan Standar Akuntansi Keuangan berbasis IFRS dalam penyajian laporan keuangan entitas nirlaba. Salah satu perubahan mendasar dalam ISAK 35 adalah penyederhanaan klasifikasi aset netto menjadi aset netto tanpa pembatas dan aset netto dengan pembatas, yang sebelumnya dalam PSAK 45 dibedakan menjadi aset netto tidak terikat, aset netto terikat temporer, dan aset netto terikat permanen (Nisa dkk., 2023). Penyederhanaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta memudahkan pengguna dalam memahami informasi yang disajikan.

Meskipun ISAK 35 telah diberlakukan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi nirlaba belum sepenuhnya menerapkan ketentuan ISAK 35 karena keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi, minimnya pemahaman terhadap standar akuntansi, serta belum optimalnya sistem administrasi keuangan yang dimiliki organisasi. Akibatnya, laporan keuangan yang disusun masih bersifat sederhana, hanya berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga belum mampu menyajikan informasi keuangan secara lengkap sesuai dengan standar yang berlaku.

Menurut Siahaan dan Purba (2024) Akuntansi Keuangan (ISAK) 35, entitas berorientasi nirlaba adalah yang mendapatkan sumber daya dari pemberi sumbangan tanpa ekspektasi pengembalian atau manfaat ekonomi setara dengan sumbangan yang diberikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fokus utama organisasi nirlaba adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau konsep "public service" dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 mengenai organisasi berorientasi nirlaba, organisasi tersebut memiliki kewajiban dan hak untuk menyusun laporan keuangan dan memberikan laporan tersebut kepada pemakai eksternal.

Menurut Manek dkk. (2024) Dengan penerapan ISAK 35, pengelolaan keuangan organisasi nirlaba akan menjadi lebih terarah dan akuntabel. Standar ini mengatur panduan akuntansi khusus untuk organisasi nirlaba yang memiliki tujuan sosial atau amal. Organisasi tersebut diharuskan melakukan pertanggungjawaban publik terhadap penggunaan dana dan kegiatan mereka. Melalui pelaporan keuangan yang jelas dan tepat waktu, ISAK 35 memastikan transparansi dalam pengelolaan dana dan menyampaikan informasi tentang dampak sosial dari kegiatan organisasi. Diharapkan penerapan standar ini akan membantu organisasi nirlaba mengoptimalkan penggunaan dana untuk mencapai tujuan sosial mereka dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan.

Gereja merupakan salah satu organisasi berorientasi nirlaba yang mengelola dana umat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan, ibadah, pembangunan, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai organisasi yang memperoleh dana dari kolekte, persembahan, sumbangan, dan donasi jemaat, gereja memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 menjadi penting karena dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan gereja secara menyeluruh, meningkatkan kepercayaan jemaat, serta mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan oleh pengurus gereja.

Namun, pada praktiknya masih banyak gereja yang belum menerapkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan ketentuan ISAK 35. Pengelolaan keuangan umumnya masih dilakukan melalui pencatatan sederhana yang berfokus pada penerimaan dan pengeluaran kas, sementara aset gereja hanya dicatat dalam bentuk daftar inventaris tanpa dilakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian sesuai standar akuntansi. Kondisi tersebut mengakibatkan informasi keuangan yang dihasilkan belum menggambarkan posisi keuangan organisasi secara utuh sehingga tingkat transparansi dan akuntabilitas kepada jemaat maupun donor belum optimal.

Fenomena tersebut juga ditemukan pada Gereja Katolik St. Maria Fatima Betun. Berdasarkan hasil observasi awal, penyusunan laporan keuangan gereja masih belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan ISAK 35. Laporan keuangan yang disusun masih terbatas pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan penyajian laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan belum disusun secara lengkap sesuai dengan standar yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan dalam ISAK 35 dengan praktik penyusunan laporan keuangan di gereja.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang. **Analisis Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi keuangan (ISAK) No. 35 Pada Gereja Katolik St. Maria Fatima Betun”**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat penyajian laporan keuangan pada Gereja Katolik St. Maria Betun sebagai entitas berorientasi nirlaba dan Apakah penyajian laporan keuangan pada Gereja Katolik St. Maria Fatima Betun telah sesuai dengan ketentuan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka persoalan yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyajian laporan keuangan pada Gereja Katholik St. Maria Fatima Betun Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35?
2. Apakah Penyajian Laporan Keuangan Gereja Katholik St. Maria Fatima Betun sudah sesuai dengan ketentuan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 35?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di buat maka tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui apakah gereja sudah menerapkan penyajian laporan keuangan berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam bidang akuntansi, khususnya mengenai penyajian laporan keuangan nirlaba berdasarkan ISAK No. 35. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menambah literatur ilmiah di lingkungan perguruan tinggi serta menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi keuangan pada organisasi atau lembaga nirlaba, termasuk gereja, yayasan, dan organisasi sosial lainnya.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi sektor nirlaba yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK No. 35. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai penerapan standar akuntansi pada entitas nirlaba, khususnya lembaga keagamaan, sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai implementasi ISAK No. 35 serta peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.